

**Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan  
Umum**



# **REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**



**Perjanjian Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2025 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

## **Daftar Isi**

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.....	3
Lampiran 1	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum .....	9
Lampiran 2	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum .....	11
Lampiran 3	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum .....	13



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.  2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	82 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	5 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		mediasi di lingkungan peradilan umum	
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80 Persen
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	
<b>005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum</b>	Rp.	<b>128.272.021.000,-</b>
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah).	Rp.	79.387.880.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat).	Rp.	5.760.000,-
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	1.226.675.000,-
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.	Rp.	42.356.216.000,-
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	3.463.041.000,-
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum.	Rp.	1.832.449.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Arry Soelaksono

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Nopember 2025

Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (jumlah)</b>
1.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	82 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	
<b>6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)</b>	<b>Rp</b>	<b>42.356.216.000,-</b>
6243.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp.	350.000.000,-
6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	38.453.518.000,-
6243.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	1.578.628.000,-
6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	681.250.000,-
6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	1.292.820.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Jenderal  
 Badan Peradilan Umum  
  
 Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Badan Peradilan Umum  
  
 Kurnia Arry Soelaksono



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis  
Peradilan Umum

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
  
Bambang Myanto

  
Hasanudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**  
**DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM**  
**TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14 Persen
2.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  2. Indeks Layanan SDM	79.7 Nilai
			3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	1.226.675.000,-
1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp.	1.226.675.000,-
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	3.463.041.000,-
6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	746.336.000,-
6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	2.699.705.000,-
6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	17.000.000,-

Jakarta, 6 November 2025



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis  
Peradilan Umum

Hasanudin



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
  
Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi  
Peradilan Umum

  
Zahlisa Vitalita

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN**  
**DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM**  
**TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.  2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan	82 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82 Persen
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Umum yang mudah dan terjangkau		
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah)	Rp	79.387.880.000,-
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	4.201.401.000,-
1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi	Rp.	1.275.710.000,-
1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	52.673.422.000,-
1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	13.320.180.000,-
1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	7.917.167.000,-
<b>1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat)</b>	<b>Rp</b>	<b>5.760.000,-</b>
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	5.760.000,-
<b>6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.832.449.000,-</b>
6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	1.211.855.000,-
6630.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp	620.594.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi

Peradilan Umum

Zahlisa Vitalita

